



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Warisan Utang Kegiatan Fisik 2024 Jadi Sorotan

Bupati Seluma Pastikan Segera Lakukan Kajian

SELUMA - Warisan utang pembayaran kegiatan di tahun anggaran 2024 dari pimpinan sebelumnya terus menghantui Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE, MM. Terbaru pada Rabu 5 Maret 2025 sejumlah kontraktor kegiatan fisik mendatangi Kantor Bupati Seluma untuk menanyakan kejelasan status hak mereka yang belum dibayarkan.

Atas hal ini, Bupati Seluma mengaku akan segera melakukan kajian kajian untuk menanggapi perihal warisan utang yang bisa dikatakan sangat besar tersebut. Bupati mengaku saat ini belum dapat memberikan jawaban pasti mengenai warisan utang tersebut, namun ia menegaskan akan segera memanggul Inspektorat Seluma, BKD Seluma dan OPD terkait untuk mengetahui penyebab serta alasan mengapa sejumlah kegiatan fisik tersebut tidak dibayarkan pada tahun 2024 lalu.

"Akan kita kaji dulu bersama OPD berwenang dan terkait, karena saat ini saya belum mengetahui persis apa penyebab warisan utang ini bisa banyak dan mengapa tidak dibayarkan,"sampai Bupati Teddy.

Terkait dibayar atau tidaknya utang kegiatan fisik tersebut, Bupati menegaskan akan mempelajari lebih dahulu apakah regulasinya mendukung atau tidak untuk dilakukan pembayaran.

"Akan kita pelajari dulu berdasarkan aturan yang ada, jika memang diatur mengenai mekanisme pembayaran utang, tentu akan kita kerjakan. Jika tidak ada aturannya, maka akan kita lewatkan,"tegas Bupati Teddy.

Mencuatnya utang kegiatan fisik 2024 terkhususnya di Dinas PUPR Seluma ini usai kontraktor yang mengerjakan proyek mendatangi Kantor Bupati Seluma pada Rabu siang 5 Mei 2025. Kedatangan mereka tampak didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seluma, M. Syaifullah, ST, tujuan mereka untuk menuntut pembayaran utang proyek yang telah mereka selesaikan sebelum akhir tahun 2024.

Salah satu kontraktor, Adi Topan (37), mengungkapkan kekecewaannya karena hingga saat ini mereka belum menerima pembayaran meskipun pekerjaan telah selesai 100 persen dan sudah dilakukan Provisional Hand Over (PHO), yang berarti serah terima pekerjaan sementara dari kontraktor kepada pemilik proyek telah dilakukan.

"Kami datang ke sini ingin mendapatkan kejelasan. Proyek sudah selesai dikerjakan sebelum akhir 2024, tapi hingga kini kami belum menerima pembayaran," ujar Adi Topan dengan nada tegas.

Kepala Dinas PUPR M. Syaifullah menjelaskan

bahwa saat ini prosesnya masih dilakukan proses pengakuan utang oleh Pemkab Seluma. Menurutnya, total utang yang belum dibayarkan Pemkab Seluma kepada pihak ketiga mencapai Rp 20 miliar atau rincinya Rp 20.095.945.148, ini berasal dari 86 paket kegiatan fisik tahun anggaran 2024. Namun, hingga kini belum ada kepastian apakah anggaran tersebut akan dimasukkan dalam pergeseran APBD murni atau baru akan dianggarkan dalam APBD Perubahan.

"Saat ini masih dalam proses pembuatan SK pengakuan utang oleh Pemkab Seluma. Jumlahnya cukup besar, lebih dari Rp20 miliar, dan itu belum termasuk honor serta SPPD yang juga belum diakui," ungkap M. Syaifullah.

Meski telah mendapatkan penjelasan dari Kadis PUPR, para kontraktor tetap berharap ada kepastian pembayaran dalam waktu dekat. Mereka menilai bahwa keterlambatan pembayaran ini sangat membebankan, mengingat sebagian besar kontraktor telah mengeluarkan modal besar untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.

Setelah mendapatkan penjelasan, para kontraktor akhirnya membubarkan diri. Namun, mereka menegaskan akan terus mengawal perkembangan pembayaran utang proyek ini hingga ada kejelasan dari Pemkab Seluma. (zzz)